

## PENDATAAN TERNAK TANGGULANGI PMK

# 37.000 Ekor Sapi dan Kerbau Dipasangi Eartag

**SLEMAN (KR)** - Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pertanian tentang penandaan dan pendataan ternak dalam rangka penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman akan mulai melaksanakan penandaan dan pendataan ternak pascavaksinasi PMK dengan menggunakan tanda pengenal atau identitas pada ternak berupa Eartag Secure QR Code yang terhubung secara Digital.

Penandaan dan pendataan yang dilakukan ini menggunakan tanda pengenal atau identitas pada ternak berupa Eartag Secure QR Code yang terhubung secara digital melalui aplikasi yang bernama 'Identik PKH' pada handphone berbasis android.

"Aplikasi tersebut sudah tersedia dan dapat diunduh melalui Play Store. Hal ini dilakukan, untuk mengiden-

tifikasi ternak-ternak yang telah divaksin melalui kartu vaksin virtual yang dapat dilihat oleh siapa pun melalui aplikasi tersebut," ungkap Kepala DP3 Sleman Suparmono kepada *KR*, Minggu (18/9).

Dijelaskan, pemasangan eartag ini untuk memudahkan pencatatan dan pendataan, monitoring jumlah populasi hewan, status reproduksi, dan distribusi

melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Serta seleksi dalam tata laksana pemeliharaan ternak, dan sebagai identitas ternak (KTP) ternak dengan sasaran ternak yang telah divaksin, ternak yang belum divaksin, dan ternak yang tidak divaksin di wilayah Kabupaten Sleman,

"Diawali dari wilayah Dusun Srunen Glagaharjo Cangkringan, sejumlah 100

ekor ternak telah dipasangi eartag mulai Jumat (16/9) sampai dengan selesai. Ternak di Kabupaten Sleman yang ditargetkan akan dipasangi eartag sebanyak 37.000 ekor sapi dan kerbau," papar Suparmono.

Dikatakan pula, penandaan ternak ini dilakukan pada hewan rentan PMK seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan babi. Hewan yang telah diberi tanda pengenal atau identitas (Eartag Secure QR Code) dilakukan pendataan melalui penginputan data identitas hewan dan identitas pemilik (peternak) pada aplikasi 'Identik PKH'.

"Harapannya dengan penandaan dan pendataan



*Ternak di Sleman mulai dipasangi eartag.*

KR-Istimewa

secara digital ini dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan pengendalian dan pencegahan perluasan keja-

dian PMK di lapangan. Selain itu untuk mengetahui jumlah populasi hewan, status reproduksi,

dan distribusi melalui penerapan teknologi informasi dan Komunikasi," pungkask Suparmono. (Has)-f

## PEMKAB SLEMAN GELAR OPERASI PASAR MURAH Minyak Goreng Dijual Rp 11.000/Liter



KR-Istimewa

*Bupati Kustini dan Kadisperindag Mae Rusmi terlibat dalam operasi pasar murah.*

**SLEMAN (KR)** - Sebagai upaya memenuhi kebutuhan sembako masyarakat, Pemkab Sleman melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menggelar operasi pasar murah. Operasi pasar menyediakan 5 komoditas digelar lingkungan Lapangan Pemda Sleman, Minggu (18/9).

Kepala Disperindag Sleman Mae Rusmi menjelaskan, pasar murah ini menyediakan sebanyak 300 kilogram untuk masing-masing komoditas.

"Tidak ada syarat khusus untuk masyarakat yang ingin membeli kebu-

tuhan pokok di pasar murah. Namun terdapat pembatasan dalam pembelian yang dilakukan. Masyarakat hanya diperbolehkan membeli 2 kilogram untuk setiap bahan pokok kecuali beras," ujarnya.

Mae Rusmi menambahkan, di pasar murah ini terdapat perbedaan harga pasaran pada masing-masing bahan pokok. Dicontohkan untuk harga pasaran minyak goreng Rp 14.000, jika di pasar murah hanya dijual seharga Rp 11.000. Begitu juga untuk harga bahan pokok lainnya.

Sedang menurut Bupati Kustini, kegiatan pasar murah ini merupakan hasil kerjasama Pemkab Sleman dengan Bulog, distributor (Jogja Telur), dan Perhimpunan Petani Hortikultura Puncak Merapi (PPHPM).

"Pemkab Sleman melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pasar murah bahan pokok ini sehingga dapat menyediakan 5 komoditas yaitu beras, gula, minyak, telur dan cabai," jelasnya.

Bupati menyebut, kegiatan operasi pasar murah ini direncanakan digelar di 17 Kapanewon. "Kami akan melakukan evaluasi terlebih dahulu dalam rencana penyelenggaraan pasar murah selanjutnya, serta akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi," ujarnya.

Ditambahkan, Sleman juga mendapat alokasi sebanyak 40 ton bahan pokok dengan empat komoditas dari provinsi. Pemkab Sleman sendiri juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 500 juta dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok di Sleman. (Has)-f

## 'Bedhol Projo' Kalurahan Sidokarto



KR-Istimewa

*Wabup Danang Maharsa menyerahkan doorprize kepada peserta senam massal.*

**GODEAN (KR)** - Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menghadiri jalan sehat dan senam massal dalam rangka 'Bedhol Projo' Kalurahan Sidokarto di Embung Danawarih Rewulu Wetan Sidokarto Godean, Minggu (18/9). Acara Senam diikuti sekitar 700-an peserta dari padukuhan di Kalurahan Sidokarto.

Danang memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut. Menurutnya, antusiasme masyarakat mengikuti senam karena kesadaran akan kesehatan masyarakat juga sebagai hiburan pascapandemi Covid-19. "Luar biasa, ratusan orang berkumpul untuk senam bersama, ini adalah wujud kesadaran masyarakat akan kesehatan, terlebih ini menjadi momentum dimana selain dapat sehat, juga dapat hiburan" ujarnya.

Danang berharap akan banyak acara seperti ini di Kabupaten Sleman, sehingga perekonomian akan tergerak dan meningkat ketika banyak terselenggara acara serupa yang melibatkan banyak orang. "Dengan kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti ini, akan banyak juga pelaku UMKM yang terlibat didalamnya dengan harapan tentunya perekonomian juga akan meningkat" ungkap Danang

Anggota DPRD DIY H Koeswanto juga memberikan apresiasinya atas terselenggara rangkaian acara Bedhol Projo Kalurahan Sidokarto. Menurutnya kegiatan ini merupakan kegiatan positif untuk menghidupkan perekonomian masyarakat. "Bedhol Projo Sidokarto banyak melibatkan masyarakat karena rangkaian acaranya seminggu, tentu perekonomian akan meningkat" ujarnya. (Has)-f

## Pemkab Ajak HIPPI Berkolaborasi

**SLEMAN (KR)** - Pengusaha dalam hal ini Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) apabila ingin unggul dan berdaya saing harus melakukan kolaborasi. Karena itu Pemkab Sleman mengajak Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DPC Sleman untuk berkolaborasi. Apabila UMKM dan pemerintah berkolaborasi diharapkan bisa maju dan naik tingkat dalam bidang apapun. Sehingga pengusaha bisa tampil percaya diri dan bisa menggerakkan perekonomian di Pemkab Sleman.

"Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari masyarakat. Oleh karena itu kolaborasi itu menjadi penting untuk kemajuan UMKM," kata Bupati Sleman Kustini dalam acara Bincang-bincang Santai Pelaku UMKM Sleman dengan tema 'Kolaborasi Forkom dan HIPPI DPC Sleman Menuju UMKM Sleman Unggul dan Berdaya' di Pendapa Rumah Dinas Bupati Sleman, Sabtu (17/9).

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sleman R Haris Martapa mengatakan, instansinya membuka ruang bagi DPC HIPPI Sleman bisa berkolaborasi dalam memfasilitasi anggotanya. Misalnya memberikan pelayanan konsultasi bagi UMKM, memberikan pelatihan dan lain-lain. Terlebih selama ini Dinas Koperasi dan UMKM Sleman juga sudah bekerjasama dengan UGM untuk memberikan pelatihan bagi UMKM di Kabupaten Sleman.

Ketua Umum HIPPI DPC Sleman Atik Sri Purwaningsih menyambut baik ajakan kerja sama ini. Bahkan HIPPI DPC Sleman akan berkolaborasi dengan Forkom UMKM se Kabupaten Sleman untuk memajukan UMKM di Sleman. (Ria)-f



KR-Istimewa

*Bupati Kustini dalam acara Bincang-bincang Santai Pelaku UMKM Sleman.*

## DPRD KABUPATEN SLEMAN

# SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp. (0274)868413, Fax (0274)868413

### KINERJA KOMISI A DPRD KABUPATEN SLEMAN

## Mendorong Penambahan Wilayah Manajemen Kebakaran



KR-Saifulah Nur Ichwan

*Hasto Karyanto*

**SLEMAN (KR)** - Dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan wilayah yang luas, Kabupaten Sleman ini baru memiliki dua wilayah manajemen kebakaran yaitu pos induk di Sleman dan Godean. Idealnya di Kabupaten Sleman ini memiliki 3-5 wilayah manajemen kebakaran agar target 15 menit sampai lokasi kebakaran bisa tercapai. Untuk itu Komisi A DPRD Kabupaten Sleman mendorong adanya penambahan wilayah manajemen kebakaran.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sleman Hasto Karyanto SIP mengatakan, baru adanya dua wilayah manajemen kebakaran ini tentu akan berpengaruh dengan penanganan kebakaran di Kabupaten Sleman. Ketika ada kebakaran di wilayah Sleman timur, mobil pemadam kebakaran dari Pemkab atau Godean.

"Kita tahu sendiri, kondisi jalan di Sleman juga sudah padat. Kalau untuk menjangkau wilayah timur, paling tidak membutuhkan waktu 30 menit hingga 1 jam. Sehingga Sleman ini sering terlambat sampai lokasi," kata Hasto, Minggu (18/9).

Untuk itu, Komisi A mendorong kepada eksekutif melakukan penilaian beban kerja. Apakah Bidang Pemadam Kebakaran ini perlu ditingkatkan menjadi dinas atau tidak. Jika memang perlu, pihaknya sangat mendukung pemadam kebakaran ini menjadi dinas sendiri.

"Kami sangat mendukung kalau mau ditingkatkan menjadi

dinas. Supaya untuk meningkatkan peran pemadam kebakaran dalam penanganan kebakaran di Sleman. Karena ini juga bagian dari pemerintah memberikan rasa aman bagi investor yang ingin berinvestasi di Sleman," ucap Hasto.

Namun jika tidak ditingkatkan menjadi dinas, Komisi mendorong agar menambah wilayah manajemen kebakaran di Kabupaten Sleman. Minimal

ada 3-5 lokasi yaitu berada Sleman barat, Sleman tengah, Sleman timur dan Sleman utara.

"Paling tidak ditambah di wilayah Depok yang mengkaver wilayah perkotaan, Kalasan mengkaver wilayah timur sampai Prambanan dan wilayah Pakem mengkaver wilayah utara. Supaya nanti target respons time 15 menit sampai lokasi bisa tercapai. Sehingga risiko korban dan kerugian bisa

diminimalisasi," ucap anggota dewan dari Fraksi PKS ini.

Dengan adanya penambahan wilayah manajemen kebakaran ini, tentu juga perlu ada penambahan SDM, sarana dan prasarana dan peralatan. Untuk itu Komisi A akan berkomitmen mendukung dari sisi anggaran dalam rangka mewujudkan penambahan wilayah manajemen kebakaran. "Ketika ada penambahan SDM, sarana dan

prasana, serta peralatan, tentu dibutuhkan anggaran. Dan kami berkomitmen untuk menganggarkan karena ini demi kepentingan masyarakat Sleman," tambah Hasto.

Hal senada dikatakan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sleman H Ngadiman SAg MSI. Pihaknya juga sepakat perlu adanya penambahan wilayah manajemen kebakaran. Paling tidak Sleman barat, tengah, timur dan utara. Harapannya ketika ada kebakaran bisa segera tertangani dengan baik.

"Artinya di Sleman ini perlu tambah dua atau tiga lagi. Utamanya di wilayah tengah dan timur dan utara. Soalnya pernah kejadian di wilayah Sleman timur, petugas kebakaran terlambat karena posisinya terlalu jauh sehingga respons time lebih dari 15 menit," kata Ngadiman, anggota DPRD Sleman dari PPP ini.

Di sisi lain, lanjut Ngadiman, pengembangan wilayah di masing-masing kapanewon cukup



KR-Istimewa

*Ngadiman*

pesat. Baik itu wilayah Sleman barat, tengah, timur dan utara. Dengan membawahi wilayah manajemen kebakaran, tentu akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

"Sekarang ini pembangunan gedung bertingkat dan rumah-rumah cukup pesat. Tentu pemerintah perlu mempersiapkan sejak dini penanggulangan risiko bencana. Sehingga kita perlu tambah petugas dan armadanya," pungkask Ngadiman. (Sni)-f



KR-Saifulah Nur Ichwan

*Komisi A rapat dengan mitra kerja.*